



Rencana Aksi Kegiatan


Tahun 2020 - 2024




**Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Makassar**

 kkpmakassar@yahoo.co.id

 [@kkpkelas1makassar](https://www.facebook.com/kkpkelas1makassar)

 [@kkp_makassar](https://www.instagram.com/kkp_makassar)

 [@kkp_makassar](https://twitter.com/kkp_makassar)

 kkpmakassar.com



KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Kekejarantinaan di pintu masuk negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan pertama untuk tahun RPJMN 2020-2024, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya ke depan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan di pintu masuk negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit. Bagi Kepala Bidang dan Seksi di bawah Satuan Kerja, diharapkan RAK 2020-2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, Agustus 2020

Kepala KKP Kelas I Makassar,



dr. Darmawali Handoko, M.Epid
NIP. 196911252002121003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kondisi Umum	4
C. Potensi dan Permasalahan	10
BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	14
A. Visi dan Misi	14
B. Tujuan	14
C. Sasaran Strategis	15
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, dan Kerangka Regulasi	16
A. Arah Kebijakan.....	16
B. Strategi.....	16
C. Kerangka Regulasi	17
BAB IV Target Kinerja, Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan	20
A. Target Kinerja.....	20
B. Kegiatan.....	21
C. Kerangka Pendanaan	27
BAB V Penutup	29
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel	IV.1 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK KKP Kelas I Makassar Tahun 2020-2024.....	20
Tabel	IV.2 Pendanaan Bersumber APBN Tahun 2020-2024 KKP Kelas I Makassar Tahun 2020-2024	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2020 5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaan.

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan

dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

B. Kondisi Umum

Secara umum pada tahun 2019, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar telah berhasil mencapai target dan indikator yang ditetapkan. 107,01 % jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantina Kesehatan, 100 % respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP, 122,35 % jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit, 133,33 % jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus, 100 % jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah, 157,27 % jumlah sertifikat/surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan, 85,71 % jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi, 100 jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area, 116,99 % jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung, 102,08 % jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, 111,76 % jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P, dan 100,43 % jumlah pengadaan sarana prasarana.

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2020 sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang PNS dan ditambah tenaga Non PNS yakni satpam sebanyak 8 orang, sopir sebanyak 12 orang, cleaning service sebanyak 8 orang, pramubakti sebanyak 4 orang.

a. Menurut Jabatan :

1) PNS	=	133 orang
a) Jabatan Struktural	=	13 orang
b) Jabatan Fungsional Teknis	=	25 orang
c) Jabatan Pelaksana	=	97 orang

2) Non PNS	=	32 orang
a) Pengamanan Kantor (Satpam)	=	8 orang
b) Pengemudi (Sopir)	=	12 orang
c) Cleaning Service	=	8 orang
d) Pramubakti	=	4 orang

b. Menurut Golongan :

1) Golongan II	=	19 orang
2) Golongan III	=	94 orang
3) Golongan IV	=	20 orang

c. Menurut Pendidikan :

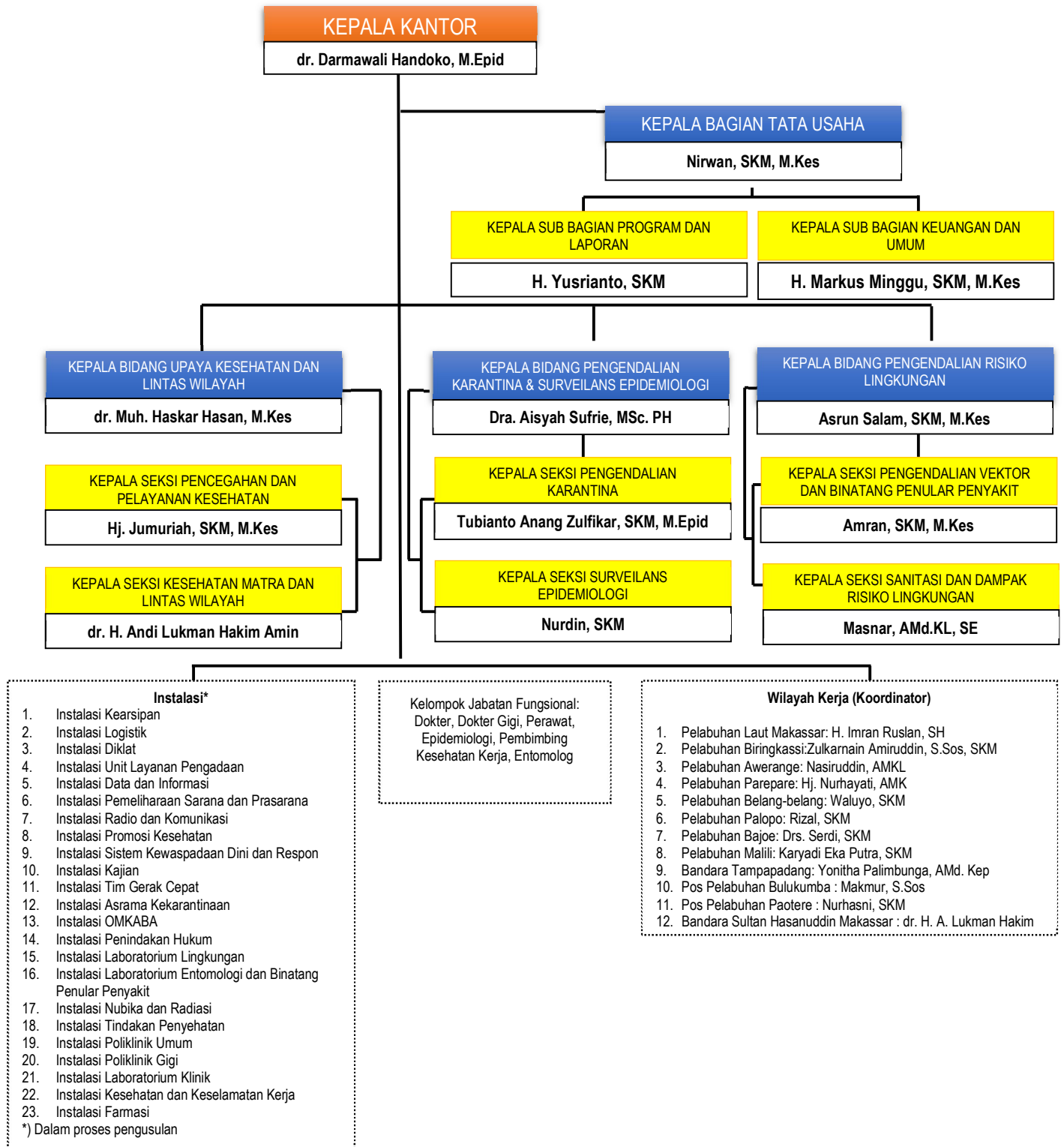
1) S2	=	45 orang
2) S1	=	45 orang
3) DIV	=	5 orang
4) DIII	=	34 orang
5) SMA	=	4 orang

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja KKP Kelas I Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 356/MENKES/PER/IV/2008 tanggal 14 April 2008 dan Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011; tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Struktur organisasi KKP Kelas I Makassar terdiri atas :

1. Bagian Tata Usaha terdiri dari dua sub bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Program dan Laporan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Umum
2. Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi terdiri dari dua seksi yaitu :
 - a. Seksi Pengendalian Karantina

- b. Seksi Surveilans Epidemiologi
- 3. Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan terdiri dari dua seksi yaitu :
 - a. Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit
 - b. Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan
- 4. Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah terdiri dari dua seksi yaitu:
 - a. Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan
 - b. Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah
- 5. Wilayah Kerja
- 6. Instalasi
- 7. Kelompok jabatan fungsional



Gambar I.1
Struktur Organisasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

Uraian tugas masing-masing bagian dan bidang adalah :

1. Bagian Tata Usaha

a. Sub Bagian Program dan Laporan

- 1) Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan program
- 2) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan
- 3) Menyebarluaskan informasi

b. Sub Bagian Keuangan dan Umum

- 1) Melaksanakan Urusan Akuntansi, Verifikasi serta Mobilisasi Dana
- 2) Melaksanakan Urusan Tata Usaha
- 3) Melaksanakan Urusan Kepegawaian
- 4) Melaksanakan Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga
- 5) Penyiapan Penyelenggaraan Pelatihan

2. Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi

a. Seksi Pengendalian Karantina

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan sertifikasi OMKABA ekspor dan impor
- 2) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan pengawasan kekarantinaan terhadap kapal, pesawat udara dan alat transportasi lainnya.
- 3) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan tindakan kekarantinaan terhadap kapal, pesawat udara dan alat transportasi lainnya.
- 4) Penerbitan dokumen kesehatan kapal laut, pesawat udara dan alat transportasi lainnya.

- 5) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengangkutan orang sakit/jenazah.
- 6) Kajian di bidang kekarantinaan
- 7) Pengembangan teknologi di bidang kekarantinaan
- 8) Pendidikan dan pelatihan di bidang kekarantinaan

b. Seksi Surveilans Epidemiologi

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit.
- 2) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit potensial wabah.
- 3) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali.
- 4) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan jejaring kerja surveilans epidemiologi nasional/internasional.
- 5) Kesiapsiagaan KLB, bencana/pasca bencana bidang kesehatan
- 6) Pengkajian KLB, bencana/pasca bencana bidang kesehatan
- 7) Advokasi KLB, bencana/pasca bencana bidang kesehatan
- 8) Penanggulangan KLB, bencana/pasca bencana bidang kesehatan

3. Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan

a. Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pemberantasan serangga penular penyakit.

- 2) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pemberantasan tikus dan pinjal.
- 3) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengamanan pestisida.
- 4) Kajian dan diseminasi informasi bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit.
- 5) Pengembangan jejaring kerja bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit.
- 6) Pengembangan kemitraan bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit.
- 7) Pengembangan teknologi bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit.
- 8) Pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit.

b. Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan

- 1) Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan penyediaan air bersih.
- 2) Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengamanan makanan dan minuman.
- 3) Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan hygiene dan sanitasi kapal laut dan pesawat.
- 4) Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan hygiene dan sanitasi gedung/bangunan.

- 5) Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pencemaran udara, air dan tanah.
- 6) Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan penyediaan air bersih.
- 7) Kajian dan diseminasi informasi bidang sanitasi lingkungan
- 8) Pengembangan jejaring kerja dan kemitraan bidang sanitasi lingkungan
- 9) Pengembangan teknologi bidang sanitasi lingkungan
- 10) Pendidikan dan pelatihan bidang sanitasi lingkungan

4. Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah

a. Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelayanan pengujian kesehatan nakhoda, anak buah kapal dan penjamah makanan.
- 2) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pengawasan obat/P3K di kapal/pesawat/alat transportasi lainnya.
- 3) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelayanan kajian ergonomik.
- 4) Advokasi dan sosialisasi kesehatan kerja
- 5) Pengembangan jejaring kerja di bidang kesehatan kerja
- 6) Pengembangan kemitraan bidang kesehatan kerja
- 7) Pengembangan teknologi bidang kesehatan kerja
- 8) Pelatihan teknis bidang kesehatan kerja

b. Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional (ICV)
- 2) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah
- 3) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan kesehatan matra
- 4) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan kesehatan haji
- 5) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan perpindahan penduduk
- 6) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana
- 7) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan kesehatan terbatas
- 8) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan rujukan gawat darurat medik.
- 9) Pengembangan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan matra
- 10) Pengembangan teknologi bidang kesehatan matra
- 11) Pelatihan teknis bidang kesehatan matra.

C. Potensi dan Permasalahan

1. Jumlah Pelabuhan dan bandara yang memenuhi syarat sanitasi belum mencapai target di tahun 2019

Dari 7 (tujuh) lokasi target, 6 (enam) lokasi yang mencapai target sedangkan 1 lokasi belum mencapai target yaitu lokasi di Pelabuhan Makassar. Parameter yang tidak mencapai target tersebut adalah parameter Tempat Pengolahan Makanan (TPM) dan parameter Penyediaan Air Bersih (PAB). Pengawasan sanitasi dilakukan secara rutin maupun berkala terhadap faktor fisik lingkungan yang memungkinkan terjadinya penularan penyakit. Pengawasan dilakukan berupa pemeriksaan, pemberian saran perbaikan, kunjungan kembali, rekomendasi pihak terkait serta laporan. Pengawasan TPM dilaksanakan minimal sekali dalam 2 (dua) bulan, pengawasan tempat penyediaan air bersih dilakukan pada setiap bulan dan/atau jika ditemukan adanya indikasi pencemaran terhadap sarana air bersih. Pengawasan tempat PAB dilakukan berupa inspeksi dan pengambilan serta pengujian sampel air. Pengawasan TTU dilakukan berupa inspeksi terhadap fisik bangunan yang berpotensi terjadinya penularan penyakit.

Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi syarat untuk TPM, PAB dan TTU ditindak lanjuti dengan bersurat ke Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dan GM PT. Pelindo IV (Persero) Cab. Makassar tentang hasil pengawasan faktor risiko kesehatan serta memberikan rekomendasi untuk :

- a. Melakukan tindakan pemusnahan terhadap makanan/minuman kadaluarsa yang telah ditarik; pembinaan secara berkala terhadap tenat pada kawasan kuliner agar tidak menjual makanan/minuman yang sudah kadaluarsa; serta senantiasa memperhatikan kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya.
- b. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar bak penampungan air; menguras bak penampungan air dan klorinasi secara berkala; serta air bersih yang dimasukkan pada bak penampungan utamanya air bersih yang bersumber dari sumur bor untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut.
- c. Mengembalikan kios ke fungsi semula sebagai tempat penjualan makanan jadi.

2. KLB/Bencana

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum dipraktekkan oleh masyarakat khususnya di lingkungan Pelabuhan / bandara. Misalnya, masih banyaknya anggota masyarakat yang mengkonsumsi makanan yang tidak sehat/ lingkungan sanitasinya buruk dan perilaku hidup bersih dan sehat yang masih rendah. Kondisi ini berdampak pada peningkatan angka kejadian penyakit menular. Keadaan ini perlu diwaspadai mengingat banyaknya Tenaga Bongkar Muat (TKBM), penjamah makanan yang ada di pelabuhan rata-rata pendidikannya rendah. Disamping itu, para TKBM kurang memperhatikan aspek kesehatan kerja, salah satunya adalah rendahnya kesadaran untuk menggunakan *safety care* sehingga rawan menimbulkan terjadinya penyakit akibat kerja dan terjadinya KLB.

3. Profesionalisme Petugas dan Kesiapan Prosedur

Keterampilan serta pemahaman terhadap prosedur pelayanan/kegiatan sebagian SDM di KKP Kelas I Makassar masih perlu ditingkatkan untuk melaksanakan tugas pokok maupun untuk mengatasi/menghadapi kejadian-kejadian PHEIC.

4. Lemahnya Koordinasi

Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi di lapangan antara instansi terkait di wilayah pelabuhan. Sebagai contoh adalah kurangnya koordinasi antara KKP dengan Bea Cukai terkait dengan pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA di pelabuhan. Demikian juga koordinasi dengan para penyedia jasa pelayaran, penerbangan, dll.

5. Munculnya Penyakit Baru maupun Penyakit Lama (*New Emerging Diseases & Re-emerging Diseases*)

Era globalisasi mengakibatkan semakin meningkatnya aktifitas di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara. Transmisi penyakit potensial

wabah sertapenyakit lainnya yang berpotensi menimbulkanke daruratan kesehatan yang meresahkan dunia turut meningkat sejalan dengan hal tersebut.Penyakit-penyakit yang penyebarannya sangat cepat kepenjuru dunia (termasuk Indonesia) meliputi *New Emerging Disease*, seperti *Avian Influenza*, *SARS*, *Legionnaires Disease*, Nipah Virus, dan *Paragoniasis Pulmonallis*. *Emerging Disease* antara lain HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya seperti *Dengue Haemorrhagic Fever*, Chikungunya, *Cholera*, *Salmonellosis*, dan Filariasis. Selain Itu, penyebaran penyakit MERS CoV dan penyakit menular lainnya melalui jemaah umroh juga menjadi perhatian dan perlu diwaspadai. *Re-emerging disease* antara lain : Pes, TBC, *Scrub thypus*, Malaria, Anthrax dan Rabies.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Menurunkan angka *stunting* pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

B. Tujuan

Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen pencegahan dan Pengendalian penyakit dalam Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar memiliki tujuan strategis Meningkatnya Pelayanan Kekejarantinaaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah

C. Sasaran Strategis

Dalam mencapai tujuan strategis ditetapkan sasaran strategis, yaitu meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100%

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi kegiatan KKP Kelas I Makassar adalah mendukung kebijakan dan strategi Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka ditetapkan arah kebijakan KKP Kelas I Makassar sebagai berikut :

1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko.
2. Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi.
3. Penguatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan yang profesional, tangguh, terpercaya dengan didukung sarana prasarana yang memadai.
4. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program
5. Memelihara, meninjau dan melakukan penyesuaian Sistem Manajemen Mutu untuk peningkatan berkelanjutan demi kepuasan pelanggan

B. Strategi

Seperti yang telah ditetapkan di Bab sebelumnya, bahwa KKP Kelas I Makassar telah menetapkan tujuan strategis yang mendukung strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 serta mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut :

1. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan factor risiko
2. Peningkatan respon kejadian penyakit dan factor risiko
3. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan factor risiko
4. Peningkatan komunikasi dan advokasi
5. Penguatan akuntabilitas
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
7. Kerjasama lintas sector dan program

C. Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana Pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran Pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh satuan kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan.

Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain :

1. UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular;
2. UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
6. Permenkes RI No. 2348/Menkes/Per/XI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356/Menkes/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
7. Permenkes 949 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
8. Permenkes 1501 tahun 2010 Tentang jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah & Upaya penganggulangannya;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
10. Permenkes Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 Tahun

- 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional;
 18. Keputusan Menkes No.612/MENKES/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia;
 19. Standar Operasional Prosedur Nasional Kegiatan KKP di Pintu Masuk Negara;
 20. SOP Prosedur Penyiapan Rencana Kegiatan dan Data Dukung Rencana Usulan RKA-K/L, Nomor OT.02.02/1.2/4250/2019;
 21. SOP Prosedur Pengawasan International Certificate Vaccination, Nomor OT.02.02/3/4306/2019;
 22. SOP Prosedur Penyusunan Laporan E Monev DJA, Nomor OT.02.02/1.2/4355/2019;
 23. SOP Prosedur Penanganan Pesawat/Kapal Dalam Status Karantina, Nomor SR.01.07/2.1/2601/2020;
 24. SOP Prosedur Deteksi Dini Penyakit Menular, Nomor OT.02.02/2.1/2760/2020;

25. SOP Prosedur Pengawasan Lalulintas Orang Sakit dan Penerbitan Surat Keterangan Laik Terbang, Nomor OT.02.02/2.1/2764/2020;
26. SOP Prosedur Pengawasan Higiene Sanitasi Pesawat, Nomor OT.02.02/3/2775/2020;
27. SOP Prosedur Pengelolaan Vaksin, Nomor OT. 02.02/1.2/2804/2020;
28. SOP Pengawasan Kepadatan Kecoak di TPM Bandara/Pelabuhan, Nomor OT.02.02/3/2819/2020;
29. SOP Pengawasan Vektor di Pelabuhan/ Bandara, Nomor OT.02.02/3/2820/2020;
30. International Health Regulation Tahun 2005.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis KKP Kelas I Makassar, beberapa kebutuhan regulasi yang dibutuhkan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah terkait Penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan;
2. Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara;

BAB IV

TARGET KINERJA, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN

Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan KKP Kelas I Makassar tahun 2020-2024.

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

Tabel IV.1
Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK
KKP Kelas I Makassar Tahun 2020-2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan sebesar 1.093.471 2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 93% 3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 85%

			<p>4. Nilai kinerja anggaran sebesar 81%</p> <p>5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar 80%</p> <p>6. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 75</p> <p>7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 45%</p>
--	--	--	--

B. Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan 2020-2024.

Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar adalah meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan. Untuk mencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan.

Kegiatan yang dilakukan :

- a. Pengawasan sanitasi bangunan/ gedung/ perkantoran/ industri/ TTU/ TPM
- b. Pengambilan, Pemeriksaan dan Rujukan Sampel Lingkungan
- c. Self Assesment / Penilaian Pelabuhan Sehat
- d. Pengawasan faktor risiko kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional
- e. Supporting penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada situasi khusus

- f. Pengawasan faktor risiko kesehatan bagi pelaku perjalanan dari daerah endemis
- g. Pelaksanaan Pra Embarkasi
- h. Pengawasan faktor risiko dalam rangka arus mudik
- i. Layanan Kesehatan pada situasi khusus (SBK)
- j. Pengadaan Bahan Kekarantinaan Kesehatan
- k. Refreshing petugas TGC
- l. Layanan Pengawasan Faktor risiko pada alat angkut, orang dan barang
- m. Pemeriksaan Sanitasi Alat Angkut
- n. Pemeriksaan Faktor risiko kesehatan penjamah makanan di Kapal Penumpang
- o. Pembekalan Tenaga Bantuan Pengawasan Pelaku Perjalanan dalam rangka penanganan covid-19
- p. Penyediaan Bahan Kesehatan
- q. Penyediaan Bahan Pemeriksaan Habis Pakai
- r. Pengadaan Bahan Kesehatan Laboratorium Kesehatan Lingkungan Haji
- s. Distribusi Vaksin/Obat/Perbekkes Pelayanan Kesehatan
- t. Deteksi Dini HIV -AIDS (VCT Mobile) di Wilayah Kerja
- u. Deteksi dini penyakit TB di Pelabuhan / Bandara
- v. Sosialisasi Pengawasan Laik Terbang, Lalu Lintas Jenazah dan HPGAD Ke Lintas Sektor Terkait di Wilker
- w. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi program Kekarantinaan Kesehatan
- x. Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan Bandara, termasuk Malaria Cross Border
- y. Koordinasi, Konsolidasi, Konsultasi pelaksanaan penanganan covid-19
- z. Layanan Kekarantinaan Kesehatan Untuk Penerbitan SSCC/SSCEC
- aa. Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP (certificate of pratique)
- bb. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara

- cc. Layanan kekarantinaan dalam rangka penerbitan PHQC(Port Health Quarantine Clearence)
 - dd. Layanan Tindakan Penyehatan Alat Angkut
 - ee. Layanan Pemeriksaan P3K Kapal
 - ff. Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus
 - gg. Biaya alat habis pakai untuk layanan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/Aids
 - hh. Biaya alat habis pakai untuk layanan deteksi dini terduga TBC di wilayah kerja KKP
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.
- Kegiatan yang dilakukan :
- a. Pertemuan evaluasi forum pelabuhan sehat
 - b. Penguatan sistim layanan rujukan Rumah Sakit
 - c. Tindakan Penyehatan Lingkungan/Alat Angkut
 - d. Pemusnahan Limbah Medis
 - e. Evaluasi Hasil Deteksi Dini HIV-AIDS
 - f. Evaluasi program TB
 - g. Verifikasi dan pengawasan terhadap klinik dan Rumah sakit yang melakukan pelayanan vaksinasi internasional dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional
 - h. PenangananKarantina/ isolasi mandiri covid-19
 - i. Pemeriksaan Rapid/Swab/Rujukan sampel Covid-19
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara.
- Kegiatan yang dilakukan :
- a. Kursus Penjamah Makanan
 - b. Penyuluhan Sanitasi Lingkungan Pelabuhan
 - c. Monev Resistensi / Efikasi Insektisida
 - d. Bahan dan kelengkapan pengendalian vector

- e. Pertemuan koordinasi/ konsultasi pengendalian faktor risiko lingkungan
- f. Pemberdayaan Saka Bakti Husada
- g. Verifikasi Rumor penyakit potensial KLB/ Penyelidikan Epidemiologi
- h. Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan KKM di Wilker Pelabuhan Belang-Belang Pos Pel. Pasangkayu
- i. Penyusunan Rencana Kontinjensi dan Table Top Exercise di Wilker Awerange
- j. Table Top Exercise di Pelabuhan Makassar
- k. Community Base Surveilans
- l. Perlengkapan Pengendalian Faktor Risiko
- m. Fooging
- n. Pemetaan
- o. Persiapan bahan dan alat
- p. Pemasangan perangkat
- q. Identifikasi tikus dan pinjal
- r. Spraying
- s. Survei dan larvasida
- t. Survei jentik
- u. Survei nyamuk
- v. Survei Vektor Diare

4. Nilai kinerja anggaran.

Kegiatan yang dilakukan :

- a. Penyusunan E-Planning
- b. Penyusunan RKA-K/L
- c. Pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan anggaran dan revisi anggaran
- d. Penyusunan Target dan Pagu PNBPNBP
- e. Pertemuan/ Konsultasi pengelolaan/Pelaporan PNBPNBP

- f. Penyusunan Laporan E Monev Penganggaran
 - g. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan.
- Kegiatan yang dilakukan :
- a. Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan/ Triwulan/ Semester/ Tahunan
 - b. Verifikasi dan Rekonsiliasi LK UAPPA E-1 Laporan Keuangan Satker Pusat, UPT, Dekon Tahun 2019 dan Semester I TA 2020
 - c. Rekonsiliasi Pengelolaan PNBPNBP
 - d. Koordinasi Pengelolaan PNBPNBP
 - e. Penyusunan Dokumen Perbendaharaan dan Pertanggung jawaban Keuangan
 - f. Upaya Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan
6. Kinerja implementasi WBK satker.
- Kegiatan yang dilakukan :
- a. Penyusunan laporan pelaksanaan program
 - b. Penyusunan Laporan E Monev Bappenas/PP.39 tahun 2006
 - c. Penyusunan Laporan Tahunan satker
 - d. Penyusunan laporan indikator RAK
 - e. Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja
 - f. Penyusunan profil dan media KIE
 - g. Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pegawai
 - h. Layanan Mutasi Kepegawaian
 - i. Pelayanan Hukum
 - j. Pengelolaan Rumah Tangga
 - k. Layanan Humas
 - l. Layanan Organisasi Tatalaksana
 - m. Pengelolaan BMN
 - n. Kaliberasi Alat Kesehatan

- o. Desiminasi Informasi melalui media KIE
- p. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- q. Belanja keperluan sehari-hari perkantoran
- r. Pengadaan pakaian dinas
- s. Pengadaan pakaian kerja dokter/satpam/sopir/tenaga lainnya
- t. Pemeliharaan/perbaikan peralatan/mesin kantor
- u. Pemeliharaan kendaraan R4
- v. Pemeliharaan kendaraan R2
- w. Perbaikan peralatan fungsional
- x. Langganan daya dan jasa
- y. Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
- z. Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja
- aa. Honor petugas pramubakti, pengamanan kantor, sopir dan cleaning service
- bb. Sewa gedung/kantor/wilker
- cc. Sewa rumah jabatan
- dd. Kalibrasi alat-alat Kesehatan
- ee. Pas pelabuhan/bandara
- ff. Cleaning services
- gg. Sewa Mesin Fotocopy
- hh. Pemeriksaan Kesehatan ASN
- ii. Langganan Internet Service Provider
- jj. Penambah Daya Tahan Tubuh

7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL.

Kegiatan yang dilakukan :

- a. Workshop Pengelolaan Website
- b. Peningkatan Kompetensi
- c. On Job Training Pengawasan Kualitas Lingkungan
- d. Peningkatan kompetensi petugas teknis sanitasi lingkungan
- e. Peningkatan SDM petugas entomolg Kesehatan

- f. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Sanitarian
- g. Workshop Penerbitan dokumen Simkespel
- h. Mengikuti Diklat / Pelatihan/ Workshop / Simposium dalam rangka peningkatan kompetensi bagi Petugas
- i. Workshop/Simposium Travel Medicine/Aeromedicine
- j. Pelatihan EKG bagi Tenaga Dokter
- k. Pelatihan Kedaruratan Kesehatan

C. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut di atas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tabel IV.2
Pendanaan Bersumber APBN Tahun 2020-2024
KKP Kelas I Makassar

No	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
KKP Kelas I Makassar											
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	177.470	195.502	216.290	239.332	264.877	3,834,256,000	4,217,681,600	4,639,449,760	5,103,394,736	5,613,734,210
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	91%	91%	95%	96%	271,678,000	298,845,800	328,730,380	361,603,418	397,763,760
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%	85%	85%	85%	85%	1,441,496,800	1,585,646,480	1,744,211,128	1,918,632,241	2,110,495,465
4	Nilai kinerja anggaran	80	80	81	82	83	250,260,000	275,286,000	302,814,600	333,096,060	366,405,666
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	80%	80%	80%	80%	17,527,846,000	19,280,630,600	21,208,693,660	23,329,563,026	25,662,519,329
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	75	75	75	75	5,430,128,000	5,973,140,800	6,570,454,880	7,227,500,368	7,950,250,405
7	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	45%	45%	45%	45%	453,314,000	498,645,400	548,509,940	603,360,934	663,697,027

BAB V

P E N U T U P

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas I Makassar Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya KKP Kelas I Makassar dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Bagian/Bidang/Subbag/Seksi di KKP Kelas I Makassar mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua Bagian/Bidang/Subbag/Seksi di KKP Kelas I Makassar. Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

RAK ini juga mengamanatkan perlunya dilakukan evaluasi tengah periode (*midterm review*). Berdasarkan hasil reviu, tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan (revisi) terhadap substansi dari RAK KKP Kelas I Makassar ini sesuai dengan perkembangan, tuntutan pelayanan dan dinamika pembangunan kesehatan. Revisi dilakukan sebagai bentuk penyesuaian atas perubahan indikator pendukung program kegiatan P2P. Revisi indikator dalam RAK KKP Kelas I Makassar ini mengikuti indikator standar yang harus dicapai oleh semua Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai bentuk dukungan dan pertanggungjawaban kegiatan pada Ditjen P2P. Selain pertanggungjawaban kegiatan juga sebagai pertanggungjawaban terhadap realisasi anggaran yang diberikan.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas I Makassar, upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

LAMP IRAN

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Kepala Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	Kepala Seksi Pengendalian Karantina, Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi
				Kepala Bidang Pengendalian Resiko Lingkungan	Kepala Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit, Kepala Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan
				Kepala Bidang Upaya Kesehatan & Lintas Wilayah	Kepala Seksi Pencegahan & Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Kesehatan Matra & Lintas Wilayah
		2	Persentase faktor resiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Kepala Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	Kepala Seksi Pengendalian Karantina, Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi
				Kepala Bidang Pengendalian Resiko Lingkungan	Kepala Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit, Kepala Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan
				Kepala Bidang Upaya Kesehatan & Lintas Wilayah	Kepala Seksi Pencegahan & Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Kesehatan Matra & Lintas Wilayah
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Kepala Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	Kepala Seksi Pengendalian Karantina, Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi
				Kepala Bidang Pengendalian Resiko Lingkungan	Kepala Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit, Kepala Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan
		4	Nilai kinerja anggaran	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Sub Bagian Keuangan & Umum, Kepala Sub Bagian Program dan Laporan
		5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Sub Bagian Keuangan & Umum, Kepala Sub Bagian Program dan Laporan
		6	Kinerja implementasi WBK satker	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Sub Bagian Keuangan & Umum, Kepala Sub Bagian Program dan Laporan
		7	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Sub Bagian Keuangan & Umum, Kepala Sub Bagian Program dan Laporan

**MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN
TAHUN 2020 – 2024**

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL (DO)	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan sesuai Standar Kekeamtinaan Kesehatan	Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan	1. Pemeriksaan/ Penapisan orang	160.500	178.333	198.148	220.165	244.627
			2. Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina	15.100	15.895	16.732	17.612	18.540
			3. Pemeriksaan Barang	700	770	856	951	1.056
			4. Pemeriksaan Lingkungan {TTU, TPM}	1.170	504	554	604	654
2	Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada indikator no.1	1. Pemeriksaan/ Penapisan orang	90%	90%	90%	95%	95%
			2. Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina	90%	90%	90%	95%	95%
			3. Pemeriksaan Barang	90%	90%	90%	95%	95%
			4. Pemeriksaan Lingkungan {TTU, TPM}	90%	92%	94%	96%	98%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara	Jumlah Lokasi / wilker yang melaksanakan Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara	1. Kelengkapan data surveilans (kelengkapan data surveilans sampai dengan rekomendasi untuk tiap-tiap jabfung {epid, sanitarian, entomolog, dokter, perawat, lab})	85%	85%	85%	85%	85%
			2. Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam (informasi/sinyal terkait kasus penyakit dan bencana yang diterima terkait pelaku perjalanan dan masyarakat bandara/pelabuhan/P LBD)	85%	85%	85%	85%	85%
			3. Penyusunan rencana kontigensi (Penyusunan dokumen renkon yang baru {kumulatif dokumen renkon --> tidak termasuk reuiu})	85%	85%	85%	85%	85%
			4. Indeks pinjal ≤ 1	85%	85%	85%	85%	85%
			5. HI perimeter = 0	85%	85%	85%	85%	85%

			6. Tidak ditemukan larva anopheles	85%	85%	85%	85%	85%
			7. Kepadatan kecoa rendah < 2	85%	85%	85%	85%	85%
			8. Kepadatan lalat < 2	85%	85%	85%	85%	85%
			9. TTU memenuhi syarat	85%	85%	85%	85%	85%
			10. TPM laik hygiene	85%	85%	85%	85%	85%
			11. Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan	85%	85%	85%	85%	85%
4	Nilai Kinerja Anggaran	E Monev DJA	Persentase Monev DJA	80	80	81	82	83
5	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan	Penilaian Prosentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan	Penilaian Prosentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan di hitung berdasarkan jumlah total skor pada tiap parameter yang di nilai dibagi dengan jumlah parameternya dikalikan dengan prosentase maksimal 100% Kecuali untuk pelaporan bulan Januari – Mei Terdapat Kebijakan dari Kementerian Keuangan dilakukan Upload di bulan Juni sesuai surat S-537/PB/2020 Tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Tingkat UAKPA dan KPPN Tahun 2020	80%	80%	80%	80%	80%
6	Kinerja Implementasi WBK Satker	Akan ada tools untuk penilaian implementasi WBK Satker	Tools Implementasi WBK	70	75	75	75	75
7	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Pegawai yang ditingkatkan kemampuannya sesuai kompetensinya {seminar, workshop, capacity building, on job training}	Persentase Pegawai yang ditingkatkan kemampuannya sesuai kompetensi	45%	45%	45%	45%	45%